

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.⁸

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta

⁸ Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal.140.

tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁹

2. Hal-Hal yang Harus Dimuat dalam Pertimbangan Hakim

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pembedaan yang lain sebagainya.¹⁰

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP. Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum

⁹ *Ibid*, Hal. 141.

¹⁰ Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Banda Aceh. Jurnal Ilmu Hukum. No. 66. Fakultas Hukum. UNSYIAH. Hal. 344.

dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.¹¹

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang- undangan.¹²

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi:

- a. Sikap perilaku apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana.
- b. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung.
- c. Sikap arrogance power, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakkan kekuasaan”, disini hakim merasa

¹¹ *Ibid*, Hal. 345.

¹² Sutyoso Bambang. 2006. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta. UII Pres. Hal. 5.

dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun terdakwa).

- d. Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.¹³

Faktor objektif meliputi :

- a. Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut mempengaruhi putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.
 - b. Profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.¹⁴
4. Pertimbangan Hukum Seorang Hakim

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim

¹³ Yahya Harahap, sebagaimana dikutip M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta. Kencana. Hal. 93.

¹⁴ LH Permana. 2016. *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*. Lampung. Jurnal. Fakultas Hukum. Universitas Lampung. Hal. 9.

benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan.¹⁵

B. Jenis-Jenis Putusan Hakim Pengadilan

Putusan Hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.¹⁶

Menurut ketentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan rumusan KUHP tersebut putusan hakim, dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu:

a. Putusan Akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa

¹⁵ R Afandi. *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak*. Dalam <http://download.portalgaruda.org>. access 20 November 2018.

¹⁶ Tri Andirisman. 2016. *Hukum Acara Pidana*. Lampung. Universitas Lampung. Hal. 68.

sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis hakim kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

b. Putusan Sela

Berdasarkan pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Jenis putusan hakim ditinjau dari sifatnya terbagi tiga yaitu:

- a. Putusan deklarator atau deklaratif (*declatoir vonnis*) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Hal tersebut merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan.
- b. Putusan constitutief (*constitutief vonnis*) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan

suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.

- c. Putusan condemnatoir adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat condemnatoir adalah bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif.¹⁷

C. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

1. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak adanya penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹⁸

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaarfeit*

¹⁷ Admin. *Arti Putusan Deklarator, Putusan Constitutief dan Putusan Condemnatoir*. Dalam <https://www.hukumonline.com>. Access 19 November 2018.

¹⁸ S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan Cet. 3*. Jakarta. Stora Grafika. Hal. 204.

menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal demikian juga dapat seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.

Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”

Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁹

¹⁹ Satochid Kartanegara. 1955. *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Jakarta. Balai Lektur Mahasiswa. Hal. 54.

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.²⁰

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.²¹

2. Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana

a. Teori-Teori tentang Kesalahan

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu *kesengajaan* atau *dolus* dan *kealpaan* atau *culpa*. Beberapa pasal dalam KUHP membuat kesalahan dalam bentuk kesengajaan dengan menggunakan berbagai rumusan, di samping beberapa tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan, misalnya saja pada Pasal 359 dan 360 KUHP yang sering diterapkan di dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Beberapa bentuk kesalahan yaitu:

1) Kesengajaan (*dolus*)

²⁰ Wiryo Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung. PT. Refika Aditama. Hal. 79.

²¹ Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang. Yayasan Sudarto. Hal. 38.

Dolus menurut bahasa Belanda yaitu *opzet* dan dalam bahasa Inggris disebut *intention* yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sengaja atau kesengajaan. Terlebih dahulu harus diketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sendiri tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan *opzet*. Walaupun demikian, pengertian *opzet* ini sangat penting, oleh karena dijadikan unsur sebagian peristiwa pidana disamping peristiwa yang mempunyai unsur culpa. Kesengajaan yang hanya ditujukan kepada perbuatannya yang dilarang disebut kesengajaan formal, sedangkan yang ditujukan kepada akibatnya adalah kesengajaan material.²²

Beberapa pakar hukum pidana ada yang mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang itu menghendaki akibat, karena paling banter orang hanya bias membayangkan akibat, sebab mungkin terdapat faktor-faktor X yang berada diluar kekuasaannya yang mempengaruhi hubungan sebab akibat itu. Oleh sebab itu, terdapat teori-teori dalam hal ini, yaitu:

a) Teori Kehendak (*con Hippel*)

Dalam teori kehendak ini sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan kata lain, dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu

²² Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramita. Hal. 51.

dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan.²³

b) Teori Membayangkan

Berdasarkan teori membayangkan bahwa sengaja berarti mengetahui dan dapat membayangkan kemungkinan akan akibat yang timbul dari perbuatannya tanpa ada kehendak atau maksud untuk akibat tersebut.²⁴

Dengan alasan psikologis menurut teori ini tidak mungkin suatu akibat itu dapat dikehendaki. Manusia hanya bisa menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan akibat yang akan terjadi. Dapat dirumuskan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat dibayangkan sebagai maksud, dan oleh karena itu perbuatan tersebut dilakukan oleh yang bersangkutan sesuai dengan bayangan yang telah dibuatnya lebih dahulu.²⁵

2) Culpa atau Kealpaan

Culpa atau kealpaan mempunyai arti yaitu kesalahan pada umumnya, akan tetapi culpa pada ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi.

²³Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 96-97

²⁴Triyadi Gembel. *Pengertian Kesalahan dalam Hukum Pidana*. dalam <http://triyadipkn.blogspot.com>. Access 20 November 2018

²⁵*Ibid*

Dalam KUHP tidak adanya penegasan apa arti kealpaan sedang Vos menyatakan bahwa culpa mempunyai dua unsur yaitu:

1. Kemungkinan pendugaan terhadap akibat
2. Tidak berhati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat.²⁶

Bentuk kesalahan yang kedua adalah kealpaan atau culpa. Berdasarkan keterangan resmi dari pembentuk KUHP mengenai persoalan mengapa culpa juga diancam dengan pidana, walaupun dengan ringan, adalah bahwa berbeda dengan kesengajaan atau dolus yang sifatnya menentang larangan justru dengan melakukan perbuatan yang dilarang.²⁷

b. Teori-Teori tentang Pertanggungjawaban Pidana

Dalam kamus hukum terdapat dua istilah pertanggungjawaban yaitu liability dan responsibility. Liability yaitu istilah hukum yang luas menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual / secara potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility adalah hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung

²⁶ Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramita. Hal. 54-55.

²⁷ *Ibid*

jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Istilah liability menurut pengertian juga penggunaan praktis menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁸

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum nullum delictum nulla poena sine pravia lege atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu

²⁸ Ridwan H.R. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 335-337.

memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.²⁹

3. Tinjauan tentang Pidanaan

a. Teori Pidanaan

Teori-teori pidana telah berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (social defence). Dalam teori-teori pidana juga mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.³⁰

a) Teori Absolut (*retributive*)

Teori absolut (*theory retributive*), memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri.

²⁹ M Suci Zahara. *Pertanggungjawaban Pidana*. dalam <http://repository.umsida.ac.id>. access 19 November 2018

³⁰ Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung. PT. Rafika Aditama. Hal. 22.

Pemidanaan diberikan kepada si pelaku karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Teori ini menyatakan, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi penderitaan.³¹

Semua kejahatan harus disertai dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak memperhatikan akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.³²

b) Teori Relatif (*deterrence/utilitarian*)

Teori relatif (*deterrence*) ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Tujuan pemidanaan berdasarkan teori ini adalah sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Menurut teori relatif, hukuman yang dijatuhkan untuk

³¹ Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 105.

³² Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung. Alumni. Hal. 12.

melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan dari hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.³³

Leonard berpendapat bahwa, teori relatif pembedaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Pidana bertujuan untuk tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.³⁴

c) **Teori Penggabungan (*integratif*)**

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan pada dasarnya adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan dari kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.³⁵

Teori gabungan ini dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu :

³³ Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 106

³⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Jakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 96-97.

³⁵ Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 107.

- 1) Teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.³⁶

d) Teori Treatment

Teori treatment menyatakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Dalam teori ini terdapat keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap human offender, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karenanya pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat treatment.³⁷

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Dengan beralaskan paham determinasi aliran ini menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan

³⁶ Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta. PT. Raja Grafindo. Hal. 162-163.

³⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Jakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 96-97

suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya. Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh sebab itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (treatment) untuk rekonsialisasi pelaku.³⁸

e) Teori Perlindungan Sosial (*social defence*)

Teori ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum dari perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.³⁹

b. Alasan Pemidanaan

Dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia adalah sebagai tahap formatif dalam penegakan hukum yang erat kaitannya dengan pelaksanaan pemidanaan khususnya pidana penjara dan pembinaan narapidana sebagai tahap eksekusi dalam penegakan hukum. Salah satu upaya

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung. Alumni. Hal. 12.

³⁹ *Ibid.*

untuk mengetahui tujuan pidana kita adalah dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini KUHP.⁴⁰

Dalam menentukan tujuan pidana menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidana ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Untuk mempertemukan dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidana dalam hukum pidana. Terdapat beberapa tujuan pidana yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidana.⁴¹

Tujuan pidana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, adalah sebagai berikut : "Untuk menakut-nakuti orang agar orang tersebut jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*general preventive*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari orang itu tidak melakukan lagi kejahatan".⁴²

Sudarto berpendapat bahwa, tujuan pidana pada hakikatnya merupakan tujuan umum negara. Dengan itu maka politik hukum adalah berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-

⁴⁰ Barda Nawawi Arief. 1984. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Semarang. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hal. 34.

⁴¹ Zainal Abidin. 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*. Jakarta. ELSAM. Hal. 10.

⁴² Andi Hamzah. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta Akademika Pressindo. Hal. 26.

undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk sama-sama yang akan datang. Selanjutnya Sudarto mengemukakan bahwa tujuan pembedaan adalah :

1. Untuk menakut-nakuti agar orang agar jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (*general preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
2. Agar mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
3. Agar mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, yakni :
 - 1) Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna
 - 2) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁴³

Romli Atmasasmit mengemukakan jika dikaitkan dengan teori restributif tujuan pembedaan adalah :

1. Dengan pembedaan maka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan yang tidak dapat dihindari tersebut dan tidak dapat

⁴³ Sudarto, 1986. *Op. cit.* hlm. 83

dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut *vindictive*.

2. Dengan pemidanaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.
3. Pemidanaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*. Yang termasuk dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya.⁴⁴

Tipe retributif yang disebut *vindictive* tersebut di atas, termasuk ke dalam kategori pembalasan. **John Kalpan**, dalam bukunya *Criminal Justice* membagi teori retributif menjadi 2 (dua), yaitu :

1. *The revenge theory* (teori pebalasan)
2. *The expiation theory* (teori penebusan dosa).⁴⁵

Pembalasan mengandung arti hutang si penjahat telah dibayarkan kembali (*the criminalis paid back*), sedangkan penebusan dosa

⁴⁴ Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung. Mandar Maju. Hal. 83-84.

⁴⁵ Muladi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung . Alumni. Hal. 13.

mengandung arti si penjahat membayar kembali hutangnya (*the criminal pays back*). Jadi pengertiannya tidak jauh berbeda. Menurut John Kalpan, tergantung dari cara orang berpikir pada saat menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut dijatuhkan apakah karena ”menghutangkan sesuatu kepadanya” ataukah disebabkan ia berhutang sesuatu kepada kita.

Sebaliknya Johannes Andenaes, menegaskan ”penebusan” tidak sama dengan ”pembalasan dendam” (*revange*). Pembalasan yaitu berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian para korban atau orang-orang lain yang simpati kepadanya, sedangkan penebusan dosa lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁴⁶

D. Alasan Penghapusan Pidana

Terdapat beberapa alasan dalam hukum pidana yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada (para) pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Meskipun KUHPidana yang sekarang ini ada mengatur tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHPidana sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang alasan penghapus pidana tersebut.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*, Hal. 14.

⁴⁷ Adikanina, *Alasan Penghapus Pidana*, dalam <http://adikanina1987.wordpress.com>, access 19 November 2018

Alasan-alasan pidana tersebut dalam KUHP termasuk dalam BAB tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau meberatkan pengenaan pidana. Terdapat penggolongan yang berbeda-beda tentang alasan penghapusan pidana. Misalnya dalam ilmu hukum pidana, alasan hukum pidana dibedakan dalam:

1. Dalam pasal 44, 48-51 KUHP, disebutkan alasan penghapus pidana umum;
2. Dalam pasal 122, 221 ayat 2, 310 dan 367 ayat 1 KUHP, disebutkan alasan penghapus pidana khusus.⁴⁸

Mvt membagi alasan penghapusan pidana ini dalam 2 (dua) golongan yaitu:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwedige gronden van ontoerekenbaarheid*), yaitu:
 - 1) Pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena penyakit, Pasal 144 dalam KUHP.
 - 2) Umur yang masih muda Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak diluar orang itu (*uitwedige gronden van ontoerekenbaarheid*)
 - 1) Daya pakasa / *overmacht* Pasal 48 KUHP.
 - 2) Pembelaan terpaksa / *noodweer* Pasal 49 KUHP.
 - 3) Melaksanakan Undang-Undang Pasal 50 KUHP.

⁴⁸ Wardah Cheche. *Penghapusan Pidana*. dalam <http://wardahcheche.blogspot.com>. access 19 November 2018.

4) Melaksanakan perintah jabatan Pasal 51 KUHP.⁴⁹

Berikut ini merupakan alasan penghapus pidana yang ada diluar Undang-Undang, maksudnya walaupun tidak diatur atau ditentukan dalam undang-undang, namun karena itu sesuai kebiasaan atau rasa keadilan maka alasan penghapus pidana diluar undang-undang tersebut diterima juga sebagai alasan penghapus pidana dalam praktik peradilan. Alasan penghapus pidana diluar undang-undang tersebut sebagai berikut:

1. Tidak terdapatnya unsur sifat melawan hukum yang materil.
2. *Consent of the victim* atau ijin dari orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana.
3. tidak ada kesalahan sama sekali.⁵⁰

⁴⁹ Tri Andrisman. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung. Anugrah Utama Rahardja (Aura). Hal. 111.

⁵⁰ *Ibid*, Hal. 129